



LAPORAN 2022 TAHUNAN



BAB I PENDAHULUAN

VISI DAN MISI

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah: **“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”**

Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna :

- Satu keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional.
- Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Misi Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut:

Misi 1 “TANGGUH DAN MANTAP”	: Melalui Penguatan Mitigasi Bencana dan Pengembangan Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan Serta Konektivitas Wilayah
Misi 2 “NTB BERSIH DAN MELAYANI”	: Melalui Transformasi Birokrasi yang berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi
Misi 3 “NTB SEHAT DAN CERDAS”	: Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah
Misi 4 “NTB ASRI DAN LESTARI”	: Melalui pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
Misi 5 “NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI”	: Melalui Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan, dan Pertumbuhan Ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi

Misi 6 "NTB ADIL DAN BERKAH" : Melalui Perwujudan Masyarakat Madani Yang Beriman, Berkarakter, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Sumber: Perda RPJMD 2019 -2023, 2020

Berpijak pada visi dan misi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menyelaraskan fungsi tugas bidang ke PU-an dengan ke 6 misi pemerintah daerah maka fungsi tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat berkaitan erat dengan misi 1, misi 4 dan misi 5 dengan deskripsi sebagai berikut :

1. Misi Pertama: Melalui Penguatan Mitigasi Bencana dan Pengembangan Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan Serta Konektivitas Wilayah
2. Misi keempat : Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
3. Misi Kelima : Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang bertumpu pada Pariwisata dan Industri

Misi ini berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyediakan infrastruktur yaitu :

Misi Pertama (sebagai penanggung jawab):

1. Bidang Sumber Daya Air : melalui program pembangunan/rehabilitasi prasarana jaringan irigasi, peningkatan/ perbaikan/ pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat pengguna air diupayakan langkah-langkah konservasi untuk stabilisasi ketersediaan air, meningkatkan keteknisan irigasi dan peningkatan peran serta masyarakat akan berimplikasi terhadap terpenuhinya kebutuhan air multisektor dan meningkatnya produktifitas lahan sehingga semakin berkembangnya komoditi unggulan yang memiliki daya saing dengan tetap mengoptimalkan peran serta masyarakat yang mengedepankan kultur sosial budaya dalam penyediaan infrastruktur.
2. Bidang Bina Marga : prasarana jalan melalui program pembangunan/ peningkatan jalan, pembangunan/ penggantian jembatan dan pemeliharaan jalan; diupayakan peningkatan kemantapan jalan, pembangunan dan perbaikan jalan akses masuk ke kawasan dan sektor unggulan seperti

kawasan wisata dan industri serta penuntasan perbaikan jalan terutama pada kawasan yang terkena dampak bencana;

3. Bidang ciptakarya : melalui program penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan rehabilitasi/rekonstruksi terhadap gedung – gedung pemerintah yang terkena dampak bencana (pembangunan dan perbaikan gedung/bangunan beserta fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan segi keselamatan, kenyamanan, termasuk aksesibilitas untuk para disabilitas dan penataan lingkungan); program penyediaan air minum dan air limbah, program fasilitas umum sosial dan program pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Selain program utama yang masuk dalam RPJMD di Dinas PUPR terdapat program pendukung sebagai berikut :

1. Program Peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta pengendalian penyelesaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut.
2. Pelayanan jasa pengujian material konstruksi : Program Pengembangan Jasa Pengujian untuk mendapatkan hasil uji yang bersertifikat sesuai dengan standar ISO
3. Bidang Jasa Konstruksi : Program Pembinaan Jasa Konstruksi untuk mendapatkan pelaku dan proses konstruksi yang berkualitas.
4. Bidang Pengembangan Permukiman melalui program Pengembangan Permukiman.

Misi Empat (Sebagai Pendukung) :

Sesuai dengan RPJMD Misi 4 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penanggung jawab. Bidang penataan ruang melalui program perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang akan berimplikasi terhadap semakin terkendalinya pemanfaatan ruang wilayah sesuai RTRW Provinsi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta konsepsi pembangunan berkelanjutan

Misi Kelima(Sebagai Pendukung) :

1. Bidang Cipta Karya : melalui program penyediaan air minum dan air limbah, peningkatan prasarana sanitasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan sehingga seluruh masyarakat NTB dapat terlayani air minum dan dapat mengelola air limbah dengan baik
2. Bidang Sumber Daya Air : melalui program pembangunan/rehabilitasi prasarana jaringan irigasi, peningkatan/ perbaikan/ pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat pengguna air diupayakan langkah-langkah konservasi untuk stabilisasi ketersediaan air, meningkatkan keteknisan irigasi dan peningkatan peran serta masyarakat akan berimplikasi terhadap terpenuhinya kebutuhan air multisektor dan meningkatnya produktifitas lahan sehingga semakin berkembangnya komoditi unggulan yang memiliki daya saing dengan tetap mengoptimalkan peran serta masyarakat yang mengedepankan kultur sosial budaya dalam penyediaan infrastruktur.
3. Bidang Bina Marga : prasarana jalan melalui program pembangunan/ peningkatan jalan, pembangunan/ penggantian jembatan dan pemeliharaan jalan; diupayakan peningkatan kemantapan jalan, pembangunan dan perbaikan jalan akses masuk ke kawasan dan sektor unggulan seperti kawasan wisata dan industri serta penuntasan perbaikan jalan teruma pada kawasan yang terkena dampak bencana;
4. Bidang Cipta Karya : program fasilitas umum sosial dan program pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (pembangunan dan perbaikan gedung/bangunan beserta fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan segi keselamatan, kenyamanan, termasuk aksesibilitas untuk para difabel dan penataan lingkungan).

Berpijak pada visi dan misi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menyelaraskan fungsi tugas bidang ke PU-an dengan ke 6 misi pemerintah daerah maka fungsi tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat berkaitan erat dengan misi 1, misi 4 dan misi 5.

BAB II

GAMBARAN UMUM BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat pula urusan yang dilaksanakan di daerah, yaitu kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk bidang Sumber Daya Air, bidang Bina Marga dan bidang Cipta Karya.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi, yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dan berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan-badan daerah Provinsi NTB, kedudukan Dinas PUPR Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah sebagai berikut:

- a. Urusan pekerjaan umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari bidang Sumber Daya Air (irigasi, embung dan sungai), Bina Marga (jalan dan jembatan), Cipta Karya (air minum, air limbah/ drainase, persampahan, sanitasi, bangunan gedung dan lingkungan permukiman), bina konstruksi dan Pengembangan Permukiman serta UPTD/Balai Jalan dan Sumber Daya Air;
- b. Urusan penataan ruang, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi;

Berikut tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi NTB sebagaimana tabel 2.1.1:

Tabel 2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	Memimpin, melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan pemerintahan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; b. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Sekretaris	Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan program dan pelaporan serta pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi; b. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan c. pengelolaan urusan keuangan; d. pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan. e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3	Bidang Sumberdaya Air	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan dan pengelolaan

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai serta penanggulangan bencana	<p>sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai;</p> <p>b. pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai;</p> <p>c. pengumpulan data pengelolaan serta penyajian data dasar sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai;</p> <p>d. penyusunan rencana pengembangan dan konservasi sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai;</p> <p>e. penyusunan rencana kegiatan sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai;</p> <p>f. pembangunan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai;</p> <p>g. pengembangan dan konservasi prasarana sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai;</p> <p>h. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai lintas kabupaten/kota dan yang bersifat khusus;</p> <p>i. pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan kawasan manfaat sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai;</p> <p>j. perijinan untuk mengadakan perubahan atau pembongkaran prasarana dan sarana sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai</p>

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			<p>lintas kabupaten/kota dan yang bersifat khusus;</p> <p>k. perijinan untuk mendirikan, mengubah dan atau membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun yang melintas sumber daya air, dan saluran irigasi;</p> <p>l. penanggulangan bencana banjir dan bencana lainnya yang terkait dengan sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai;</p> <p>m. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai;</p> <p>n. evaluasi dan penyajian laporan bidang sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai.</p> <p>o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p>
4	Bidang Bina Marga	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan serta pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan, dan penanggulangan bencana.	<p>a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan;</p> <p>b. pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis jalan dan jembatan;</p> <p>c. pembuatan data leger jalan dan jembatan;</p> <p>d. penyusunan rencana jaringan jalan dan jembatan;</p> <p>e. penyusunan rencana kegiatan di bidang jalan dan jembatan;</p>

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> f. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan; g. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi dan yang bersifat khusus; h. pengelolaan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan oleh pihak ketiga; i. perijinan untuk mengadakan perubahan atau pembongkaran prasarana dan sarana dasar jalan dan jembatan provinsi dan yang bersifat khusus; j. perijinan untuk mendirikan, mengubah dan atau membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan provinsi, dan yang bersifat khusus; k. pemberian perijinan bangunan jalan bebas hambatan lintas kabupaten/kota; l. penanggulangan bencana; m. melaksanakan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang jalan dan jembatan; n. evaluasi dan pelaporan. o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5	Bidang Cipta Karya	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan dan pengelolaan air

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		<p>tata bangunan dan kesehatan lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan, dan penanggulangan bencana.</p>	<p>minum, air limbah, persampahan, dan drainase, tata bangunan lingkungan permukiman, penyediaan prasarana perdesaan, dan perkotaan;</p> <p>b. pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase, tata bangunan lingkungan permukiman, penyediaan prasarana perdesaan, dan penyusunan rencana kegiatan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase, tata bangunan lingkungan permukiman, penyediaan prasarana perdesaan, dan perkotaan;</p> <p>c. pengelolaan gedung negara dan rumah dinas;</p> <p>d. penyusunan harga standar bangunan gedung negara (HSBGN), standar arsitektur bangunan, dan jatidiri kawasan;</p> <p>e. penataan sanitasi lingkungan, air bersih minum, air limbah, drainase dan persampahan lintas kabupaten/kota;</p> <p>f. pemberian rekomendasi teknis terhadap pembangunan, rehabilitasi, renovasi, dan restorasi dan atau penghapusan gedung negara dan rumah negara;</p> <p>g. penanggulangan bencana</p>

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			<p>h. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas dekonstruksi di bidang air minum, air limbah, persampahan, drainase, tata bangunan lingkungan permukiman, penyediaan prasarana perdesaan, dan evaluasi dan pelaporan bidang air minum, air limbah, persampahan, drainase, tata bangunan lingkungan permukiman, penyediaan prasarana perdesaan dan perkotaan</p> <p>i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p>
6	Bidang Pengembangan Permukiman	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Teknis Pengembangan Permukiman, Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman	<p>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Permukiman;</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Permukiman;</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Permukiman;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi dinas</p> <p>e. dibidang Pengembangan Permukiman;</p> <p>f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</p>
7	Bidang Tata Ruang	Melaksanakan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan	<p>a. penyusunan rencana spasial kebijakan dan program pembangunan dalam wilayah provinsi penyusunan</p>

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		<p>pengawasan penataan ruang dalam wilayah provinsi, untuk mewujudkan keterpaduan dan keselarasan pembangunan antar sektor dan antar wilayah.</p>	<p>rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi,</p> <p>b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>c. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan rencana rinci kawasan strategis provinsi (KSP);</p> <p>d. pengelolaan data base tata ruang.</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p>
8	Bidang Bina Jasa Konstruksi	<p>menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan konstruksi dalam wilayah provinsi</p>	<p>a. pelaksanaan kebijakan pembinaan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;</p> <p>b. pengaturan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;</p> <p>c. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;</p> <p>d. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;</p> <p>e. Pengembangan dan peningkatan tenaga ahli konstruksi;</p> <p>f. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi;</p>

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			g. pembinaan dan pengawasan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tingkat Provinsi dan Asosiasi Jasa Konstruksi (AJK) di wilayah Provinsi; h. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

Sumber : Pergub No. 82 Tahun 2020

Sesuai Peraturan Gubernur nomor 84 tahun 2020 terdapat 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DPUPR Provinsi NTB yaitu 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok, 2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa, 3), Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok 4) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa, 5) Balai Pengujian Material Konstruksi. Berikut tugas dan fungsinya sebagaimana tabel 2.1.2:

Tabel 2.1.2 Tugas dan Fungsi UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok	Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang pelayanan kebutuhan air melalui kegiatan operasi, pemeliharaan dan perbaikan prasarana Sumber Daya Air, pemberdayaan dan koordinasi dengan organisasi pengelolaan	a. penyusunan rencana dan program kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok; b. pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan jaringan irigasi air tanah serta jaringan irigasi lahan kering mencakup prasarana mata air, sungai, danau, waduk, embung, muara dan pantai; c. pelaksanaan operasi, embung dan bendung; d. pelaksanaan operasi prasarana sungai dan pengendali banjir;

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok.	<ul style="list-style-type: none"> e. pemeliharaan dan perbaikan prasarana jaringan irigasi, (air, tanah, lahan kering), embung, bendungan dan sungai; f. perencanaan pemakaian pelayanan air untuk irigasi, air minum dan peternakan; g. pemantauan dan pencegahan daya rusak air terhadap prasarana Sumber Daya Air serta permukiman dan pertokoan; h. pengumpulan dan pengolahan data Sumberdaya Air dan Hidrologi serta evaluasi dan pelaporan; dan i. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi umum dan keuangan.
2	UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa	melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pelayanan kebutuhan air melalui kegiatan operasi, pemeliharaan dan perbaikan prasarana Sumber Daya Air dan Hidrologi, pemberdayaan dan koordinasi dengan organisasi pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa; b. pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan jaringan irigasi air tanah serta jaringan irigasi lahan kering mencakup prasarana mata air, sungai, danau, waduk, embung, muara dan pantai; c. pelaksanaan operasi, embung dan bendung; d. pelaksanaan operasi prasarana sungai dan pengendali banjir; e. pemeliharaan dan perbaikan prasarana jaringan irigasi, (air, tanah, lahan kering), embung, bendungan dan sungai;

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> f. perencanaan pemakaian pelayanan air untuk irigasi, air minum dan peternakan; g. pemantauan dan pencegahan daya rusak air terhadap prasarana Sumber Daya Air serta permukiman dan pertokoan; h. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan; dan pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi umum dan keuangan.
3	UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok	melaksanakan sebagian tugas teknis Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Pemeliharaan Jalan di Pulau Lombok.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Pemeliharaan jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok; b. pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Provinsi di Pulau Lombok; c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan Provinsi di Pulau Lombok dengan instansi terkait; d. pengendalian atas pemeliharaan jalan Provinsi di Pulau Lombok; e. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi umum dan keuangan.
4	UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Pemeliharaan jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa; b. pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa;

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Jalan Wilayah Pulau Sumbawa	<ul style="list-style-type: none"> c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa dengan instansi terkait; d. pengendalian atas pemeliharaan jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa; e. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi umum dan keuangan.
5	UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi	melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengujian kualitas/mutu air, tanah dan bahan bangunan.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Balai Pengujian Material Konstruksi; b. pengkajian dan analisis mutu bahan material; c. pengujian dan penerapan standar mutu teknologi tepat guna; d. pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal pengujian kualitas/ mutu air, tanah dan bahan bangunan; e. pengendalian dan pengawasan mutu dalam penggunaan, pemakaian bahan bangunan; f. pelayanan jasa pengujian; g. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan; dan h. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi umum dan keuangan.

Sumber : Pergub No. 84 Tahun 2020

2.2 Kondisi Eksisting Urusan Bidang Pekerjaan Umum

Bidang Bina Marga

Jalan merupakan prasarana mutlak untuk memperlancar kegiatan ekonomi suatu daerah. Jalan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah. Jalan di Provinsi NTB terdiri dari jalan nasional 937,96 km, dan jalan provinsi sepanjang 1.484,33 km.

Panjang Jalan Nasional dan Provinsi dalam Kondisi Mantap
Tahun 2022

No.	URAIAN	PANJANG JALAN (Km)	KONDISI MANTAP (Km)	%
1	Jalan nasional	937,96	910,23	97,04
2	Jalan Provinsi	1.484,33	1.254,57	84,52

Sumber : Bidang Binamarga Dinas PUPR Prov. NTB, 2022

Bidang SDA

Infrastruktur Sumber Daya Air, sebagai prasarana untuk mendukung penyimpanan dan pendistribusian air maupun prasarana untuk pengendalian daya rusak air. Irigasi merupakan suatu bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan dan mendistribusikan air persawahan yang ada diseluruh Provinsi NTB. Bangunan irigasi terdiri dari bangunan embung, bendung, saluran induk, saluran sekunder, saluran suplesi dan saluran pembuang tersebar diseluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Infrastruktur SDA di Provinsi NTB

Infrastruktur	Satuan	Pulau Lombok	Pulau Sumbawa	Total
Bendung Skala Besar	Buah	5	24	29
Bendung Skala Sedang	Buah	34	103	137
Bendung Skala Kecil	Buah	173	513	686
Bendungan	Buah	3	12	15
Embung Skala Besar	Buah	47	29	76
Embung Skala Sedang	Buah	78	16	94
Embung Skala Kecil	Buah	51	17	68
Pos ARR (curah hujan)	Unit	101	11	112
Pos AWLR (debit air sungai)	Unit	28	9	37
Pos CR (klimatologi)	Unit	8	4	12

Sumber: Bidang SDA DPUPR NTB & BWS NT1(2022)

Bidang Cipta Karya

infrastruktur Cipta Karya pada kawasan perkotaan dan perdesaan, sebagai pendukung kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang mencakup pelayanan transportasi lokal, pelayanan air minum dan sanitasi dasar, termasuk penanganan persampahan, penyediaan drainase untuk mengatasi genangan dan pengendalian banjir di lingkungan permukiman, penanganan air limbah domestik.

Beberapa program yang menjadi perhatian bidang keciptakaryaannya antara lain penanganan jaringan air minum. Jaringan air minum adalah suatu fasilitas pelayanan dasar (SPM) yang menjadi tanggung jawab Kabupaten/ Kota, namun untuk percepatan pemenuhan SPM tersebut Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memberi bantuan kepada Kabupaten/Kota berupa jaringan primer dan sekunder yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB.

Selain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, OPD yang melaksanakan pemenuhan capaian air minum adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan air minum di perkotaan dan perdesaan. Capaian Pelayanan air minum layak hingga tahun 2022 mencapai realisasi 79,11% di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.3 Realisasi Capaian Kinerja 2020 – 2022

Realisasi capaian kinerja selama kurun waktu 3 tahun (2020 – 2022) terus mengalami kenaikan. Di bidang Bina Marga realisasi capaian tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar 80,05 %. Realisasi capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun berikutnya yakni tahun 2021 dan 2022 yang mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 84,01 % dan 84,52 %, hal ini tercapai karena adanya dukungan penanganan jalan melalui program percepatan jalan (Perda Percepatan Jalan) yang berasal dari pembiayaan APBD dan penanganan jalan dengan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pembiayaan tersebut meliputi untuk kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Bidang Binamarga maupun Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Lombok dan Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Sumbawa.

Tabel 2.3.1

Kemantapan jalan di Provinsi NTB Tahun 2020-2022

Status Jalan	Panjang Jalan	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022*
Jalan Provinsi	1.484,43	Km	1.198,83	1.188,29	1.246,18	1.247,07	1.267,11	1.254,57
		%	80,76	80,05	83,95	84,01	85,36	84,52

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2022

Untuk Bidang Sumberdaya Air (SDA) juga mengalami peningkatan, dalam kurun waktu 3 tahun (2020-2022) karena anggaran di bidang sumberdaya air tetap menjadi prioritas dan juga mendapatkan bantuan dari Program DAK. Pada tahun 2022 telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Tabel 2.3.2

Capaian Indikator Kinerja Cakupan Areal layanan Jaringan Irigasi 2020-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatnya layanan air irigasi	Cakupan Areal layanan Jaringan Irigasi (%)	-	74,75	76,12	76,04	77,00	77,60

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2022

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, untuk tahun 2020 masih belum mempunyai target kinerja, hal ini disebabkan indikator kinerja *Cakupan Areal layanan Jaringan Irigasi* tertuang dalam Renstra Revisi Dinas PUPR Provinsi NTB tahun 2019-2023.

Untuk bidang keciptakaryaannya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena permasalahan cipta karya tidak hanya ditangani oleh dana APBD Provinsi, tapi juga melibatkan APBN dan APBD Kabupaten. Realisasi cakupan air minum untuk tahun 2020 – 2022 pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.3 Capaian Indikator Kinerja Cakupan Air Minum 2020-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatnya ketersediaan air minum yang memadai	Cakupan Air Minum (%)	75,74	74,88	76,48	78,76	78,45	79,11

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2022

BAB III

ISU DAN PERMASALAHAN

Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan dapat diperoleh melalui penelaahan kondisi lingkungan pada saat ini yang dapat mempengaruhi Rencana Pembangunan Provinsi NTB pada lima tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas PUPR Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

1. Provinsi NTB selain rawan bencana gempa bumi, juga rawan bencana lain seperti banjir, tanah longsor, dan gunung meletus sedangkan Infrastruktur belum berbasis mitigasi bencana;
2. Tingkat Kemiskinan masih di atas rata-rata nasional yang disebabkan belum terlayannya Infrastruktur dasar (akses terhadap air minum dan air limbah/sanitasi layak);
3. Pengelolaan dan penanganan persampahan di permukiman penduduk belum bebas sampah dan lingkungan tidak sehat sehingga kualitas dan daya dukung lingkungan belum optimal;
4. Belum optimalnya pemanfaatan pengembangan kawasan pesisir dan pulau pulau kecil;
5. Belum optimalnya layanan infrastruktur jaringan jalan, ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas antar wilayah pulau;
6. Kondisi fisik sarana dan prasarana sumber daya air (kewenangan provinsi) banyak yang rusak akibat kurangnya pemeliharaan;
7. Sarana penunjang kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder masih kurang memadai;
8. Kapasitas SDM pengelola jaringan irigasi kurang memadai;
9. Sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan air baku masih kurang;
10. Kondisi sarana dan prasarana sungai masih banyak yang rusak dan diperlukan perbaikan dan rehabilitasi;

11. Perubahan lahan konservasi menjadi lahan budidaya serta alihfungsi lahan pada bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) telah memberikan sumbangan terhadap terjadinya degradasi Sumber Daya Air serta berkurangnya daya dukung lingkungan;
12. Tingginya tingkat laju sedimentasi di sungai akibat erosi lahan budidaya telah menyebabkan kapasitas air sungai menjadi berkurang yang menimbulkan potensi terjadinya banjir karena menurunnya kapasitas tampungan sungai;
13. RTRW detail untuk kawasan industri pertambangan belum masuk ke dalam RTRW provinsi;
14. Ketersediaan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan pembangunan di Kabupaten/Kota masih rendah;
15. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam penataan ruang;
16. Belum optimal pola dan struktur ruang dalam upaya pembenahan ketersediaan ruang dan layanan jaringan infrastruktur.

Permasalahan terkait dengan pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum dapat dijabarkan secara lebih detail pada fungsi bidang / balai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tabel 3.1.1, sebagai berikut:

Tabel. 3.1.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Sumber Daya Air		
a.	Pengelolaan sarana dan prasarana jaringan irigasi belum optimal	Pengelolaan sarana dan prasarana jaringan irigasi belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi fisik sarana dan prasarana jaringan irigasi masih ada yang rusak; - Sarana penunjang kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi masih kurang memadai; - Kapasitas SDM pengelola jaringan irigasi kurang memadai;

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi pengguna air irigasi masih rendah; - Pengelolaan aset dan fasilitas kerjasama daerah dalam pengelolaan SDA masih kurang.
b.	Pemenuhan kebutuhan air baku belum optimal	Pengelolaan sarana dan prasarana jaringan air baku belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan air baku masih kurang; - Kondisi sarana dan prasarana air baku yang rusak; - Pengelolaan aset dan fasilitas kerjasama daerah dalam pengelolaan SDA masih kurang.
c.	Kondisi sarana dan prasarana sungai dan pantai di Provinsi NTB	Belum optimalnya kinerja sarpras sungai dan pantai	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya jumlah sarpras sungai dan pantai yang rusak; - Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan DAS; - Maraknya kegiatan penambangan di ruang sungai; - Kurangnya SDM pengelola sarpras sungai dan pantai karena banyaknya yang purna tugas; - Kurangnya pengetahuan dari SDM tentang pengelolaan sarpras sungai dan pantai.
d.	Daerah genangan banjir	Belum optimalnya kinerja sarpras pengendalian banjir	<ul style="list-style-type: none"> - Luasnya daerah genangan banjir; - Banyaknya jumlah sarpras pengendalian banjir yang rusak; - Kurangnya bangunan prasarana pengendali banjir; - Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kerusakan lingkungan.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Bina Marga		
a.	Belum optimalnya layanan infrastruktur jalan	Tingkat kenyamanan dan standar pelayanan belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan dan peningkatan tidak dilaksanakan setiap tahunnya; - Kapasitas SDM pengelola layanan infrastruktur jalan kurang memadai.
b.	Ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas antar kawasan	Panjang jalan di P. Lombok lebih mantap dibanding P. Sumbawa	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya bencana longsor pada badan jalan di P. Sumbawa; - Kurangnya bangunan prasarana pengendali longsor.
c.	Tingginya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang milik jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, membangun, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan; - Kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat & atau beban total melebihi standar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM pengelola layanan infrastruktur jalan kurang memadai; - Pengelolaan aset dan fasilitas kerjasama daerah dalam pengelolaan jalan masih kurang.
d.	Masih terbatasnya aksesibilitas bagi daerah-daerah potensial terpencil	Belum sepenuhnya berfungsi untuk melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah	Jalan Provinsi yang terputus atau belum terhubung yang berada di pulau Sumbawa yang menyebabkan masih sulitnya akses mobilitas masyarakat
3.	Cipta Karya		
a.	Ketersediaan sistem penyediaan air minum regional yang belum terintegrasi	Kekeringan semakin sering dirasakan oleh masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber air baku berada di sebelah Utara, dan bagian Selatan berada dihilirnya tidak secara langsung untuk melakukan pengembangan pelayanan air minum; - Kurangnya bangunan prasarana SPAM di beberapa tempat; - Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kerusakan mata air.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
b.	Belum maksimalnya cakupan layanan air minum	Kerusakan jaringan penyediaan air minum akibat gempa bumi dan tanah longsor	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya debit air permukaan dan air tanah karena kerusakan hutan dan lingkungan; - Tidak efisiennya pola atau penggunaan atau konsumsi air minum di bagian hulu.
c.	Masih rendahnya pengelolaan air limbah, sanitasi dan persampahan	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang ada sudah mencapai umur operasionalnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya penurunan cakupan layanan karena bencana gempa; - Kurangnya kepedulian masyarakat thd kebersihan lingkn.
d.	Pengembangan ruang terbuka hijau belum optimal dan Penataan bangunan dan lingkungan yang belum optimal	Kondisi lingkungan yang memprihatinkan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana; - Mengakibatkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim; - Kurangnya penyediaan ruang publik di Kawasan-kawasan Strategis.
e.	Belum optimalnya tata kelola data Keciptakarya-an	Data infrastruktur dan prasarana KeCiptakarya-an saat ini masih berupa data-data tabular, dan hal-hal yang disajikan dalam data tersebut se-bagian besar berorientasi pada indikator keluaran	Terkendala dalam pengukuran kinerja sektor Keciptakarya-an
4.	Tata Ruang		
a.	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Kebijakan satu peta (One Map Policy) belum digunakan dalam proses perencanaan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya pemahaman stakeholder terkait penataan ruang membuat kegiatan perencanaan tata ruang masih belum optimal; - Masih rendahnya ketersediaan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) pada kawasan yang memiliki nilai strategis Provinsi.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
b.	Belum efektifnya penyelenggaraan penataan ruang	Belum optimalnya aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan pembangunan di Kabupaten/ Kota masih rendah; - Masih kurangnya upaya perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah disusun; - Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam penataan ruang; - Masih adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR); - Kurangnya pemahaman stakeholders terhadap penyelenggaraan penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; - Kurangnya kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang penataan ruang.
5.	Pengujian Material Konstruksi		
a.	Masih terbatasnya peralatan uji dan tenaga laboran yang memiliki kompetensi sesuai ISO	Belum seluruh parameter uji yang diminta pelanggan (<i>customer</i>) dapat terlayani	Kurangnya tenaga laboratorium dikarenakan banyak yang sudah pensiun dan mutasi
b.	Pendampingan dan pengawasan mutu belum optimal	Belum semua jenis jasa pelayanan dapat dilayani	Keterbatasan alat dan SDM yang belum memadai
6.	Bina Jasa Konstruksi		
a.	Masih terbatasnya kompetensi SDM jasa konstruksi	Belum optimalnya peran pembinaan dan pelatihan jasa konstruksi di daerah	Pasar jasa konstruksi daerah masih terdistorsi akibat ketidak-

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	yang memiliki standar nasional;		seimbangan antara <i>supply</i> dan <i>demand</i>
b.	Belum optimalnya sosialisasi terhadap kewajiban pembentukan UPT jasa konstruksi di Kabupaten/Kota	Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki UPT. Bina Jasa Konstruksi	Menyulitkan dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2022

BAB IV

PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

4.1 SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah di Provinsi NTB sebagaimana ditunjukkan, Pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Indikator Sasaran Pembangunan Daerah terdiri dari 4 Indikator yang terlampir pada tabel berikut:

Tabel 4.1.1 Indikator Capaian RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	Target
			Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	10
	Aspek: Pelayanan Umum					
	Fokus: Urusan Wajib Pelananaan Dasar					
	Bidang Urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Cakupan Air Minum	%	76.48	78.45	80.59	80.59
2	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50.04	52.17	54.50	54.50
3	Persentase Jalan Mantap	%	83.95	85.36	86.00	86.00
4	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang	%	9.09	18.18	27.20	27.20

4.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan, sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dalam rangka mendukung misi pembangunan daerah Tahun 2019-2023 yang terkait dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas PUPR Provinsi NTB adalah :
Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah;

Sasaran

- Sasaran Dinas PUPR Provinsi NTB meliputi :
- Meningkatnya layanan air irigasi;
- Meningkatnya kualitas jalan;
- Meningkatnya ketersediaan air minum yang memadai;

Adapun pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2019 - 2023 beserta indikator dan Target Kinerja dapat di lihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah		Cakupan Infrastruktur PUPR yang berkualitas	-	-	81,18	82,36	83,48	
			Meningkatnya layanan air irigasi	Cakupan Areal layanan Jaringan Irigasi (%)	-	-	76,12	77,00	77,83
			Meningkatnya konektivitas jaringan jalan	Persentase Jaringan Jalan yang terkoneksi (%)	-	-	88,88	89,22	89,42
			Meningkatnya kualitas jalan	Persentase Jalan mantap (%)	80,28	80,76	83,95	85,36	86,60
			Meningkatnya ketersediaan air minum yang memadai	Cakupan Air Minum (%)	72,59	75,74	76,48	78,45	80,59

Sumber : Diolah dari Hasil Revisi RPJMD 2019 - 2023

4.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 (UU No.23 Tahun 2014) pada pasal 1 (satu) bahwa Standart Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara. Pada pasal 18 dan pasal 298 UU No.23 Tahun 2014 disebutkan pula bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan pemerintah. Penggunaan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, termasuk pelayanan air minum, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yaitu (i) tercapainya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau, (ii) tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan, serta (iii) meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Air minum yang layak dikonsumsi adalah air yang sesuai dengan standart kesehatan, yaitu tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa dan bila diuji laboratorium tidak mengandung bakteri *Estheria Colli*. Melihat kenyataan yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ada beberapa kawasan yang masih kekurangan akan air minum untuk dikonsumsi, maka perlu penanganan segera. Tidak dapat dipungkiri bahwa distribusi air minum untuk air minum saat ini masih belum merata terutama di perdesaan, penduduk di perdesaan masih banyak mengalami permasalahan kurangnya pelayanan air minum. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan penduduk, sehingga aktifitas sehari-hari pun terganggu. Apabila ini terus menerus berlangsung terjadi, maka kegiatan perekonomian dan social penduduk akan mengalami kemerosotan yang fatal, sehingga pada gilirannya akan menurunkan produktivitas penduduk.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang penuh terhadap hal pelayanan umum di bidang air minum ini terutama di daerah perdesaan yang belum mendapatkan air minum untuk air minum secara maksimal. Untuk mempercepat pencapaian tingkat pelayanan air minum khususnya di kawasan perdesaan terutama bagi masyarakat yang belum memiliki jaringan distribusi air minum, maka perlu dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum yang melibatkan langsung masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan.

4.3.1 Indikator Kinerja Cakupan Air Minum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatnya ketersediaan air minum yang memadahi	Cakupan Air Minum (%)	78,45	79,11

4.4 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG T.A 2022

Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	
			Target Kinerja	Pagu 0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	54,188,071
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Dok	13	214,832.36
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dok	2	31,784.60
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Anggaran yang tersusun	Dok	2	28,781.66
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Anggaran perubahan yang tersusun	Dok	1	30,415.06

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Anggaran yang tersusun	Dok	1	16,724.74
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Anggaran perubahan yang tersusun	Dok	1	16,938.70
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Kinerja SKPD yang tersusun	Dok	2	7,357.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja yang tersusun	Dok	4	82,830.60
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Keuangan yang tersusun	Dok	18	41,294,811.31
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Bulan	12	40,979,052
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	Dok	1	162,518

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Verifikasi Keuangan yang tersusun	Dok	1	79,207
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi yang tersusun	Dok	1	7,702
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun yang tersusun	Dok	1	22,004
Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Tanggapan Pemeriksaan (LHP) yang tersusun	Dok	1	13,364
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran yang tersusun	Dok	12	12,703
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen hasil Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	Dok	1	18,261.70
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Aset/barang milik daerah pada SKPD	Dok	4	96,513.85

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang direncanakan	Dok	1	29,147.20
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	Dok	1	9,119.50
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	Dok	1	57,856.65
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	Dok	1	390.5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang berkompeten sesuai tugas dan fungsinya	Orang	7	73,593
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ASN yang disediakan	Set	1	26,313
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	47,280

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kepegawaian SKPD yang disediakan	Bulan	12	997,867.6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang disediakan	Bulan	12	15,821.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan	Bulan	12	485,646.79
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Bulan	12	0.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Bulan	12	45,043.20
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan yang disediakan	Eksemplar	1080	26,460.00
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	Orang	1000	21,177.00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah yang dilaksanakan	OT	83	403,719.64
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Unit	8	500,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	7	500,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komponen Peralatan dan Mesin yang disediakan	Unit	1	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Orang	32	9,485,354
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Kantor yang dikelola	Surat	2500	3,902.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang digunakan	Jenis	3	645,761.70

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jenis	5	52,612.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor dan pendukungnya yang disediakan	Orang	32	8,783,077.92
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	45	1,525,099
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Unit	45	560,623.45
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara secara rutin/berkala	Unit	40	0.00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Bulan	12	0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala	Unit	5	658,256.00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala	Unit	20	303,660.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala	Unit	20	2,560.00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Pelayanan Areal Irigasi	%	76.12	109,692,517
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan SDA pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Unit	10	56,596,604
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang tersusun	Dok	1	-
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				
Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Jumlah Sumur Air Tanah yang dibangun	Lokasi	10	5,565,649

Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang di rehab	Buah	10	15,809,862
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Peralatan hidrologi dan kualitas air yang dikelola dan disediakan	Set	3	276,809.42
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Orang	100	609,550.90
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Lokasi	10	5,689,747.79
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dipelihara	Buah	200	27,290,734.53
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara	Lokasi	95	3,354,250.00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas areal layanan irigasi fungsional kewenangan provinsi yang dikelola	Ha	1,006.11	51,095,913

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan lingkungan hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun	Dok	5	882,935.00
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	DI	7	14,902,856.20
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	DI	1	35,214,312.22
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	Ha	1000	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya O dan P Jaringan Irigasi Permukaan	DI	7	
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang dipelihara	Ha	0	-
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang beroperasi	DI	19	95,810.00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	76	4,168,599.79
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan	SR	240	4,168,599.79
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis SPAM yang tersusun	Dok	4	216,823.40
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	SR	240	3,951,776.39
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengelolaan sampah	%		16,280,041.20
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah peserta Rapat Koordinasi dan konsultasi Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Orang	0	16,280,041.20
Fasilitasi Kerja sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Rapat Koordinasi dan konsultasi Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Orang	0	16280041.20

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%		316,823
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah peserta Rapat koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kab/Kota	Orang		316,823
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Rapat Koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kab/Kota	Orang		316,823
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan	%	80	13,451,310
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah lokasi sistem drainase yang dibangun	Lokasi	11	13,451,310
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan yang tersusun	Dok	1	-
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah drainase perkotaan dan sarana pendukungnya yang dibangun	Lokasi	11	13,451,310

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan penyediaan infrastruktur kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	%		8,711,272
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah dan jenis infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi yang dikelola/ diselenggarakan	Kawasn	0	-
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang dikembangkan	Kawasan	0	8,626,236.60
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang teridentifikasi dan dimanfaatkan infrastrukturnya	Kawasan	0	85,036
Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pengendalian Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dok/Laporan	0	-
Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah peserta pembinaan dalam kawasan permukiman	Orang	0	-
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Daya tumbuh wilayah strategis	%	26.43	7,138,543

Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dok	2	7,138,543
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tersusunnya Laporan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dok	1	7,138,542.50
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang direhab/renovasi dan ubahsui	Unit	1	-
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Daya tumbuh wilayah strategis	%	26.43	7,149,882
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang di tata.	Unit	1	7,149,882
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang di tata.	Unit	1	7,149,882
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Mantap	%	84	508,242,290

Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	km	541	508,257,790
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan yang tersusun	kegiatan	2 ;	3,942,161.40
Pengelolaan Leger Jalan	Panjang leger jalan provinsi yang dikelola	km	0	-
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survey kondisi jalan / jembatan yang dilaksanakan	km unit	1484,43 ; 784	349,993.60
Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	km	541	416,428,260.64

Pelebaran Jalan Menambah Lajur				20,984,253.00
Rekonstruksi Jalan				6,567,500.00
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	km	0	5,173,955.45
Penggantian Jembatan				20,977,067.00
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km	1484,43 ; 784	0.00
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjangjalan provinsi yang dipelihara secara rutin	Km	79	22,541,673.51
Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	70	11,250,349.50

Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	m		0
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan jalan/dan jembatan	Dok	2	27,075.90
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Daya Serap Jasa Konstruksi bersertifikat	%	50	240,368
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli konstruksi yang mendapat sertifikasi	Orang	50	147,286
Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah dokumen SOP Penyelenggaraan tenaga kerja konstruksi yang tersusun	Dok	1	9,989
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli konstruksi yang mendapat sertifikasi	Orang	50	81,786
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	10	55,511

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah data jasa konstruksi	Dok	1	93,082
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah data jasa konstruksi	Dok	1	93,082
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	6	409,282.00
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Jumlah PERDA RTR yang telah ditetapkan	Dok	0	0
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen persetujuan substansi RTR provinsi NTB yang disetujui	Dok	0	0
Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah PERDA RTR yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Dok	0	0
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dok	1	60,396

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	Orang	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dok	0	0
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen ranperda RTR Kabupaten/kota yang dievaluasi	Dok	1	60,396
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah peserta Sosialisasi Penataan ruang	Orang	500	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Dok	1	348,886
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Dok	1	348,886
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah kawasan yang tersedia informasi/database pemanfaatan ruangnya	Dok	1	-

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Dok	1	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran Penataan Ruang yang tertangani	Dok	1	-
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus pelanggaran penataan ruang	Kasus	1	-

BAB V
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

5.1 CAPAIAN KINERJA RPJMD

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada periode akhir masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPJMD) di Provinsi NTB sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.1 Capaian Kinerja RPJMD 2021-2023

No	Program Unggulan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA
					2021	2022	2023	2022	
					Target	Target	Target	Capaian	Target
1	2	3	4	5	6	8	10	8	12
1	Air Bersih Untuk Semua dan SPAM Regional	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Air Minum	%	76.48	78.45	80.59	79.11	80.59
2	Irigasi Cukup	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan pelayanan areal irigasi	%	76.12	77.00	77.83	77.60	77.83
3	Percepatan Jalan Mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Mantap	%	83.95	85.36	86.00	84.52	86.00
4	Tata Ruang Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	9.09	18.18	27.20	14.54	27.20

5.2 CAPAIAN KINERJA RENSTRA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Lingkup Temporal 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari

RPJMD, yang disusun oleh setiap Kepala Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Kepala Bappeda Provinsi NTB. Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Capaian Kinerja Dinas PUPR Prov NTB terdiri dari:

1. Meningkatnya Layanan Air Irigasi
2. Meningkatnya Kualitas Jalan
3. Meningkatnya Ketersediaan Air Minum yang Memadai

Tabel 5.2.1 Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				
		Uraian	Satuan	2022		
				Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya layanan air irigasi	Cakupan Areal layanan Jaringan Irigasi	%	77,00	77,60	100
2	Meningkatnya kualitas jalan	Persentase Jalan mantap	%	85,36	84,52	99,02
3	Meningkatnya ketersediaan air minum yang memadai	Cakupan Air Minum	%	78,45	79,11	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Sesuai dengan Renstra Revisi Dinas PUPR ada 3 Sasaran Strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas jalan

Panjang Jalan di Provinsi NTB sebesar 8.047,29 Km yang dibedakan berdasarkan status Jalan Nasional 937,96 Km, jalan Provinsi 1.484,43 Km dan Jalan Kabupaten/Kota 5.624,9 Km. Penanganan jalan provinsi dilakukan melalui sumber dana dari APBD, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari sasaran strategis ini ditentukan indikator kinerja adalah Persentase Jalan mantap. Panjang jalan dan kondisi kemantapan jalan provinsi untuk tahun 2022 lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel

Tabel 5.2.2 Kemantapan jalan di Provinsi NTB Tahun 2022

Status Jalan	Panjang Jalan	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022
Jalan Provinsi	1.484,43	Km	1.267,11	1.254,57
		%	85,36	84,52

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2022

Pada tahun 2022, kinerja jalan mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 84,52 %, hal ini terjadi karena adanya dukungan penanganan jalan melalui program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dengan sumber dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 – 2022 serta program penanganan jalan dan jembatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar 84,52 %, naik sebesar 0,51 % dari tingkat kemantapan jalan tahun 2021 yang tercatat sebesar 84,01 %, namun capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 85,36 %. Pencapaian tingkat kemantapan jalan dibawah nilai target yang ditetapkan ini diantaranya disebabkan belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan akibat keterbatasan anggaran di masa pandemi Covid-19, masih tingginya pelanggaran terhadap pembatasan dimensi dan muatan kendaraan (*over-dimension over-loading/ODOL*) serta kerusakan dini akibat bencana alam (*curah hujan tinggi dan perubahan tata guna lahan*). Jenis pekerjaan penanganan jalan yang dilakukan meliputi kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Bidang Binamarga maupun Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Lombok dan Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Sumbawa.

Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung tercapainya target Indikator Kinerja Persentase Jalan Mantap dapat dilihat pada table

Tabel 5.2.3 Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Bidang Jalan Tahun Anggaran 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Mantap	%	85,36	84.52	99,02%
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	km	49,68	48.38	97,38%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan yang tersusun	kegiatan Lokasi km unit	2 ; 12 ; 20 ; 6	2 ; 12 ; 20 ; 6	100%
Pengelolaan Leger Jalan	Panjang leger jalan provinsi yang dikelola	km	-	-	-
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survey kondisi jalan / jembatan yang dilaksanakan	km unit	1484,43 ; 784	1484,43 ; 784	100%
Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	km	44	42,7	97,05%
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang dilebarkan	km	3.98	3.98	100%
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	km	1,60	1,60	100%
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	km	0.10	0.10	100%
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km	-	-	-
Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti	m	75,00	75,00	100%
Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	20,00	20,00	100%
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan jalan/dan jembatan	Dok	2	2	100%

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2022

2. Meningkatnya layanan air irigasi

Dari sasaran strategis ini ditentukan indikator kinerja adalah Cakupan Areal layanan Jaringan Irigasi. Pada Tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 untuk mengelola 35 Daerah Irigasi dengan luasan 1.000 Ha – 3.000 Ha. Secara keseluruhan terdapat 58.105

Ha luasan kewenangan daerah irigasi yang dikelola. Adapun Panjang saluran dari 35 Daerah Irigasi tersebut adalah 721,95 kilometer dengan saluran dalam kondisi baik sepanjang 413,05 Km (57 %), rusak ringan 61,78 km (9 %) , rusak sedang 86,05 km (12 %) dan rusak berat 161,03 km (22 %).

Capaian indikator kinerja Cakupan Areal layanan Jaringan Irigasi untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel .. sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 5.2.4 Capaian Indikator Kinerja Cakupan Areal layanan Jaringan Irigasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatnya layanan air irigasi	Cakupan Areal layanan Jaringan Irigasi (%)	77,00	77,60

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2022

Capaian Persentase Kemantapan Sistem Irigasi Provinsi NTB Pada tahun 2022 dengan target sebesar 77,00% telah melampaui target menjadi 77,60%. Dari capaian yang telah melampaui target masih terdapat beberapa tantangan di bidang sumber daya air antara lain:

1. Minimnya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pada jaringan irigasi akibat kurangnya pendanaan.
2. Alih fungsi lahan produktif menjadi perdagangan dan industri, serta alih fungsi kawasan penyangga tangkapan air menyebabkan tingginya sedimentasi pada jaringan irigasi.
3. Kerusakan jaringan irigasi yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan air irigasi.
4. Kurangnya koordinasi antara stakeholder mengenai permasalahan irigasi.
5. Minimnya sumber daya manusia di lapangan yang menjadi ujung tombak pelayanan air irigasi.
6. Pemanfaatan air irigasi yang bukan peruntukannya sebagai perikanan menyebabkan terhambatnya pemenuhan kebutuhan air lahan.
7. Inventarisasi data tanam dan produktivas yang belum dapat terpenuhi.

Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung tercapainya target Indikator Kinerja Cakupan Areal layanan Jaringan Irigasi dapat dilihat pada tabel 5.2.4

Tabel 5.2.5 Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bidang Sumberdaya Air Tahun Anggaran 2022

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Pelayanan Areal Irigasi	%	77,00	77,60	100%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan SDA pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Unit	11	11	100%
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang tersusun	Dok	5	5	100%
Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Jumlah Sumur Air Tanah yang dibangun	Lokasi	28	28	100%
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang di rehab	Buah	20	20	100%
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Peralatan hidrologi dan kualitas air yang dikelola dan disediakan	Set	3	3	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Orang	300	150	50%
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Lokasi	20	20	100%
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dipelihara	Buah	200	200	100%
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara	Lokasi	97	97	100%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas areal layanan irigasi fungsional kewenangan provinsi yang dikelola	Ha	1006	1.000,00	99%
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan lingkungan hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun	Dok	5	5,00	100%
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	DI	7	7,00	100%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	DI	1	1,00	100%
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	Ha	1000	1.000,00	100%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya O dan P Jaringan Irigasi Permukaan	DI	7	7,00	100%
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang beroperasi	DI	19	19,00	100%

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2022

1. Meningkatnya ketersediaan air minum yang memadahi
Indikator kinerja dalam sasaran strategis ini adalah Cakupan Air Minum. Pada tahun 2022 realisasi kinerja Cakupan Air Minum mencapai 79,11 % melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra sebesar 78,45 %, dengan tingkat capaian 100.84 %.

Tabel 5.2.6 Capaian Indikator Kinerja Cakupan Air Minum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatnya ketersediaan air minum yang memadahi	Cakupan Air Minum (%)	78,45	79,11

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2022

Tercapainya target cakupan air minum ini dikarenakan adanya dukungan penangan dan pembiayaan secara bersinergi yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sumber pembiayaan tersebut meliputi program/kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten.

Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam anggaran APBD (pembiayaan Provinsi) sebagai kontribusi tercapainya target Indikator Kinerja Cakupan Minum dapat dilihat pada tabel 5.2.6

Tabel 5.2.7 Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bidang Cipta Karya (SPAM) Tahun Anggaran 2022

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	78,45	79,11	100,84%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan	Unit	30	30	100,00%
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	KK	7.900	8.010	101,39%

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2022

Sedangkan untuk capaian air minum per Kabupaten/Kota lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.2.8 dibawah ini.

Tabel 5.2.8 Capaian Indikator Kinerja Cakupan Air Minum per Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapat Akses Air Minum	Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapat Akses Air Minum
1	Kab. Lombok Barat	779,199	650,786	83.52
2	Kab. Lombok Tengah	1.117.648	928,693	83.09
3	Kab. Lombok Timur	1.431.259	1,043,309	72.89
4	Kab. Sumbawa	550.533	492,152	89.40
5	Kab. Dompu	255.598	161,061	63.01
6	Kab. Bima	555.233	469,837	84.62
7	Kab. Sumbawa Barat	157.462	133,872	85.02
8	Kab. Lombok Utara	267.192	123,156	46.09
9	Kota Mataram	464.023	418,904	90.28
10	Kota Bima	167.551	123,727	73.84
	Provinsi NTB	5.745.699	4.545.496	79,11%

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2022

5.3 CAPAIAN KINERJA RENJA OPD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Adapun syarat yang harus diperhatikan dalam menetapkan Indikator kinerja antara lain adalah: (1) Indikator kinerja harus spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi; (2) Indikator kinerja harus dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif; (3) Indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan; (4) Indikator kinerja harus dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak; (5) Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan; dan (6) Efektif, data/informasi yang

berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. Indikator yang komprehensif tidak hanya memperhatikan aspek output saja, namun juga memperhatikan faktor-faktor sebelum output didapatkan dan aspek setelah output itu dicapai. Pada sektor publik seperti pemerintah menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat, karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama. Output pada sektor pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. (Tabel Terlampir)

Tabel 5.3.1 CAPAIAN RENJA DINAS PUPR PROV NTB TAHUN 2022

Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022					
			Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Pagu 0	Realisasi 0	Realisasi pagu (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	100%	54,188,071	51,621,039	95.26%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Dok	13	13	100%	214,832.36	201,637	93.86%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dok	2	2	100%	31,784.60	31,657	99.60%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Anggaran yang tersusun	Dok	2	2	100%	28,781.66	28,781	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Anggaran perubahan yang tersusun	Dok	1	1	100%	30,415.06	30,415	100.00%

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Anggaran yang tersusun	Dok	1	1	100%	16,724.74	3,755	22.45%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Anggaran perubahan yang tersusun	Dok	1	1	100%	16,938.70	16,939	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Kinerja SKPD yang tersusun	Dok	2	2	100%	7,357.00	7,351	99.91%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja yang tersusun	Dok	4	4	100%	82,830.60	82,740	99.89%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Keuangan yang tersusun	Dok	18	18	100.00%	41,294,811.31	39,132,485.05	94.76%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Bulan	12	12	100%	40,979,052	38,834,159	94.77%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	Dok	1	1	100%	162,518	160,259	98.61%

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Verifikasi Keuangan yang tersusun	Dok	1	1	100%	79,207	67,058	84.66%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi yang tersusun	Dok	1	1	100%	7,702	6,923	89.88%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun yang tersusun	Dok	1	1	100%	22,004	21,541	97.90%
Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Tanggapan Pemeriksaan (LHP) yang tersusun	Dok	1	1	100%	13,364	12,098	90.53%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran yang tersusun	Dok	12	12	100%	12,703	12,561	98.88%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen hasil Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	Dok	1	1	100%	18,261.70	17,886	97.94%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Aset/barang milik daerah pada SKPD	Dok	4	4	100%	96,513.85	69,466	71.98%

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang direncanakan	Dok	1	1	100%	29,147.20	6,213	21.32%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	Dok	1	1	100%	9,119.50	9,107	99.86%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	Dok	1	1	100%	57,856.65	53,756	92.91%
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	Dok	1	1	100%	390.50	390	99.87%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang berkompeten sesuai tugas dan fungsinya	Orang	7	7	100%	73,593	42,800	58.16%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan-nya ASN yang disediakan	Set	1	0	0	26,313	25,950	98.62%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	7	100%	47,280	16,850	35.64%

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kepegawaian SKPD yang disediakan	Bulan	12	12	100%	997,867.6	894,661	89.66%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang disediakan	Bulan	12	12	100%	15,821.00	15,645	98.88%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan	Bulan	12	12	100%	485,646.79	408,793	84.17%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Bulan	12	12	100%	-	-	0.00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Bulan	12	12	100%	45,043.20	41,547	92.24%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan yang disediakan	Eksemplar	1080	1080	100%	26,460.00	14,360	54.27%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	Orang	1000	1000	100%	21,177.00	12,275	57.96%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah yang dilaksanakan	OT	83	83	100%	403,719.64	402,042	99.58%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Unit	8	8	100%	500,000	500,000	100.00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	7	7	100%	500,000	500,000	100.00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komponen Peralatan dan Mesin yang disediakan	Unit	1	1	100%			0.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Orang	32	32	100%	9,485,354	9,314,982	98.20%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Kantor yang dikelola	Surat	2500	2500	100%	3,902.00	3,484	89.29%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang digunakan	Jenis	3	3	100%	645,761.70	597,745	92.56%

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jenis	5	5	100%	52,612.00	35,474	67.43%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor dan pendukungnya yang disediakan	Orang	32	32	100%	8,783,077.92	8,678,279	98.81%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	45	45	100%	1,525,099	1,465,007	96.06%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Unit	45	45	100%	560,623.45	505,936	90.25%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara secara rutin/berkala	Unit	40	40	100%	-	-	0.00%
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Bulan	12	12	100%	-	-	0.00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala	Unit	5	5	100%	658,256.00	655,156	99.53%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala	Unit	20	20	100%	303,660.00	302,219	99.53%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala	Unit	20	20	100%	2,560.00	1,696	66.25%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Pelayanan Areal Irigasi	%	76.12	76	165.77	109,692,517	78,361,475	71.44%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan SDA pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Unit	10	10	100%	58,596,604	44,943,619	76.70%
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang tersusun	Dok	1	1	100%	-	-	0.00%
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				0				
Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Jumlah Sumur Air Tanah yang dibangun	Lokasi	10	10	100%	5,565,649	5,547,260	99.67%

Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang di rehab	Buah	10	10	100%	15,809,862	14,944,221	94.52%
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Peralatan hidrologi dan kualitas air yang dikelola dan disediakan	Set	3	3	100%	276,809.42	46,415	16.77%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Orang	100	100	100%	609,550.90	557,725	91.50%
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Lokasi	10	10	100%	5,689,747.79	5,567,207	97.85%
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dipelihara	Buah	200	200	100%	27,290,734.53	14,930,838	54.71%
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara	Lokasi	95	95	100%	3,354,250.00	3,349,953	99.87%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas areal layanan irigasi fungsional kewenangan provinsi yang dikelola	Ha	1,006.11	1,006.11	228.28	51,095,913	33,417,856	65.40%

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan lingkungan hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun	Dok	5	5	100%	882,935.00	837,520	94.86%
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	DI	7	7	100%	14,902,856.20	14,683,971	98.53%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	DI	1	1	100%	35,214,312.22	17,803,832	50.56%
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	Ha	1000	1000	100%			0.00%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya O dan P Jaringan Irigasi Permukaan	DI	7	7	100%			0.00%
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang dipelihara	Ha	0	0	0%	-	-	0.00%
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang beroperasi	DI	19	19	100%	95,810.00	92,533	96.58%

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	76	76.48	100%	4,168,599.79	3,395,737.08	81.46%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan	SR	240	240.00	1.25	4,168,599.79	3,395,737	81.46%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis SPAM yang tersusun	Dok	4	4	100%	216,823.40	214,440	98.90%
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	SR	240	240	100%	3,951,776.39	3,181,297	80.50%
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengelolaan sampah	%		-	0%	16,280,041.20		0.00%
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah peserta Rapat Koordinasi dan konsultasi Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Orang	0	0	0%	16,280,041.20		0.00%
Fasilitasi Kerja sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Rapat Koordinasi dan konsultasi Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Orang	0	0	0%	16,280,041.20		0.00%

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%		-	0%	316,823	313,005	98.79%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah peserta Rapat koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kab/Kota	Orang		0	0%	316,823	313,005	98.79%
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Rapat Koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kab/Kota	Orang		0	0%	316,823	313,005	98.79%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan	%	80	80.01	100%	13,451,310	9,498,386	70.61%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah lokasi sistem drainase yang dibangun	Lokasi	11	11	100%	13,451,310	9,498,386	70.61%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan yang tersusun	Dok	1	1	100%	-	-	0.00%
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah drainase perkotaan dan sarana pendukungnya yang dibangun	Lokasi	11	11	100%	13,451,310	9,498,386	70.61%

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan penyediaan infrastruktur kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	%		-	0%	8,711,272	4,320,874	49.60%
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah dan jenis infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi yang dikelola/ diselenggarakan	Kawasan	0	0	0%	-	-	0.00%
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang dikembangkan	Kawasan	0	0	0%	8,626,236.60	4,237,901	49.13%
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang teridentifikasi dan dimanfaatkan infrastrukturnya	Kawasan	0	0	0%	85,036	82,973	97.57%
Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pengendalian Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dok/Laporan	0	0	0%	-	-	0.00%
Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah peserta pembinaan dalam kawasan permukiman	Orang	0	0	0%	-	-	0.00%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Daya tumbuh wilayah strategis	%	26.43	26.43	100%	7,138,543	6,383,443	89.42%

Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dok	2	2	100%	7,138,543	6,383,443	89.42%
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tersusunnya Laporan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dok	1	1	100%	7,138,542.50	6,383,443	89.42%
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang direhab/renovasi dan ubahsui	Unit	1	1	100%	-	-	0.00%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Daya tumbuh wilayah strategis	%	26.43	26.43	100%	7,149,882	5,042,799	70.53%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang di tata.	Unit	1	1.00	100%	7,149,882	5,042,799	70.53%
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang di tata.	Unit	1	1.00	100%	7,149,882	5,042,799	70.53%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Mantap	%	84	83.95	100%	508,242,290	409,013,548	80.48%

Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	km	541	540.56	100%	508,242,290	409,013,548	80.48%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan yang tersusun	kegiatan	2 ;	2 ; 12 ; 20 ; 6	0%	3,942,161.40	3,437,505	87.20%
Pengelolaan Leger Jalan	Panjang leger jalan provinsi yang dikelola	unit	0	0	0%	-	-	0.00%
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survey kondisi jalan / jembatan yang dilaksanakan	km unit	1484,43 ; 784	1484,43 ; 784	100%	349,993.60	171,873	49.11%
Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	km	541	540.56	100%	416,428,260.64	332,874,578	79.94%
Pelebaran Jalan Menambah Lajur				0		20,984,253.00	20,850,365	99.36%

Rekonstruksi Jalan				0			6,567,500.00	6,566,096	99.98%
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	km	0	0	0%		5,173,955.45	4,423,954	85.50%
Penggantian Jembatan				0			20,977,067.00	18,805,866	89.65%
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km	1484,43 ; 784	1484,43 ; 784	100%		-	-	0.00%
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjangjalan provinsi yang dipelihara secara rutin	Km	79	79.33333333	100%		22,541,673.51	21,863,309	96.99%
Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	70	70	100%		11,250,349.50	-	0.00%
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	m		0	0%		-	-	0.00%

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan jalan/dan jembatan	Dok	2	2	100%	27,075.90	20,003	73.88%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Daya Serap Jasa Konstruksi bersertifikat	%	50	50.00	100%	240,368	143,594	59.74%
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli konstruksi yang mendapat sertifikasi	Orang	50	50.00	100%	147,286	143,594	97.49%
Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah dokumen SOP Penyelenggaraan tenaga kerja konstruksi yang tersusun	Dok	1	1	100%	9,989	9,530	95.41%
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli konstruksi yang mendapat sertifikasi	Orang	50	50	100%	81,786	78,680	96.20%
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	10	10	100%	55,511	55,384	99.77%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah data jasa konstruksi	Dok	1	1.00	100%	93,082	92,320	99.18%

Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah data jasa konstruksi	Dok	1	1	100%	93,082	92,320	99.18%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	6	6.00	100%	409,282.00	327,951.48	80.13%
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Jumlah PERDA RTR yang telah ditetapkan	Dok	0	1	100%	-	-	0.00%
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen persetujuan substansi RTR provinsi NTB yang disetujui	Dok	0	0	0%	-	-	0.00%
Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah PERDA RTR yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Dok	0	0	0%	-	-	0.00%
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dok	1	1.00	100%	60,396	-	0.00%
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	Orang	0	0	0%	-	-	0.00%

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dok	0	0	0%	-	-	0.00%
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen ranperda RTR Kabupaten/kota yang dievaluasi	Dok	1	1	100%	60,396.30	-	0.00%
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah peserta Sosialisasi Penataan ruang	Orang	500	500	100%	-	-	0.00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Dok	1	1.00	100%	348,886	327,951	94.00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Dok	1	1	100%	348,886	327,951	94.00%
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah kawasan yang tersedia informasi/database pemanfaatan ruangnya	Dok	1	1	100%	-	-	0.00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Dok	1	1.00	100%	-	-	0.00%

Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran Penataan Ruang yang tertangani	Dok	1	1	100%	-	-	0.00%
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus pelanggaran penataan ruang	Kasus	1	1	100%	-	-	0.00%

5.4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM UNGGULAN

Program Strategis dan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan program yang disampaikan sejak saat kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2023. Program Strategis dan Program Unggulan Daerah Provinsi NTB merupakan program teknis yang akan dilaksanakan sebagai wujud dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk mengatasi permasalahan ditengah masyarakat

Dinas PUPR Provinsi NTB bertugas untuk melaksanakan program unggulan sebanyak 3 Program Unggulan yaitu: Air Bersih Untuk Semua dan SPAM Regional, Irigasi Cukup, Percepatan Jalan Mantap, dan Tata Ruang Berkelanjutan.

Tabel 5.4.1 Capaian Kinerja Program Unggulan

No	Program Unggulan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja			Realisasi Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	
					Target	Target	Target	Capaian	Capaian	Capaian	Target
1	2	3	4	5	6	8	10	6	8	10	12
1	Air Bersih Untuk Semua dan SPAM Regional	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Air Minum	%	76.48	78.45	80.59	78.76	79.11	-	80.59
2	Irigasi Cukup	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan pelayanan areal irigasi	%	76.12	77.00	77.83	75.52	77.60	-	77.83
3	Percepatan Jalan Mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Mantap	%	83.95	85.36	86.00	84.01	84.52	-	86.00
4	Tata Ruang Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	9.09	18.18	27.20	9.09	14.54	-	27.20

5.5 PERMASALAHAN DAN KENDALA

- Adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi Refocussing Anggaran.
- Ketidaksesuaian penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD) oleh BPKD dengan Rencana Anggaran Kas yang dibuat oleh OPD.
- Masih terdapatnya belanja yang belum direalisasikan karena kurangnya koordinasi dari masing-masing bagian/subbagian.
- Terdapat Beban Hutang Daerah yang Belum terbayarkan Pada Akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 165.025.748.194,-

5.6 SARAN DAN TINDAK LANJUT

- Mempercepat Refocussing anggaran/Pergeseran APBD.
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi NTB (BPKAD) dalam menerbitkan SPD harus mengacu pada Rencana Anggaran Kas yang dibuat oleh OPD.

BAB VI

PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMUM

Sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 (UU No.23 Tahun 2014) pada pasal 1 (satu) bahwa Standart Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanandasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara. Padapasal 18 dan pasal 298 UU No.23 Tahun 2014 disebutkan pula bahwa pelaksanaan pelayanan dasarpada urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturanpemerintah. Penggunaan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan pemerintahan Wajibyang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Adapun Jenis Standart Pelayanan Minimal sesudah UU No.23 Tahun 2014 hanya pada UrusanPemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial.

Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, termasuk pelayanan air minum, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yaitu (i) tercapainya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau, (ii) tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan, serta (iii) meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Air minum yang layak dikonsumsi adalah air yang sesuai dengan standart kesehatan, yaitu tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa dan bila diuji laboratorium tidak mengandung bakteri *Estheria Colli*. Melihat kenyataan yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ada beberapa kawasan yang masih kekurangan akan air minum untuk dikonsumsi, maka perlu penanganan segera. Tidak dapat dipungkiri bahwa distribusi air minum untuk air minum saat ini masih belum merata terutama di

perdesaan, penduduk di perdesaan masih banyak mengalami permasalahan kurangnya pelayanan air minum. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan penduduk, sehingga aktifitas sehari-hari pun terganggu. Apabila ini terus menerus berlangsung terjadi, maka kegiatan perekonomian dan social penduduk akan mengalami kemerosotan yang fatal, sehingga pada gilirannya akan menurunkan produktivitas penduduk.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang penuh terhadap hal pelayanan umum di bidang air minum ini terutama di daerah perdesaan yang belum mendapatkan air minum untuk air minum secara maksimal. Untuk mempercepat pencapaian tingkat pelayanan air minum khususnya di kawasan perdesaan terutama bagi masyarakat yang belum memiliki jaringan distribusi air minum, maka perlu dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum yang melibatkan langsung masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan.

Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung upaya ini adalah mengembangkan konsep dengan prinsip dasar adanya peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan sampai pemanfaatan yang akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan Perencanaan Penyediaan Prasarana Air Minum Tahun Anggaran 2022.

Tabel 6.1.1 Realisasi Fisik Keuangan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pelaksanaan Anggaran			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.305.823.400	3.395.737.080	64,00	95,39	1.910.086.320
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.305.823.400	3.395.737.080	64,00	95,39	1.910.086.320
	a) Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	216.823.400	214.440.000	98,90	100,00	2.383.400
	b) Sub Kegiatan : Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	5.089.000.000	3.181.297.080	62,51	95,14	1.907.702.920

**Tabel 6.1.2 Data Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Tahun Anggaran 2022**

NO	PAKET PEKERJAAN	VOLUME			sat	JUMLAH DANA		LOKASI				JUMLAH SASARAN
						ALOKASI	REALISASI	DUSUN	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	
A	APBD MURNI											
1	Pembangunan SPAM Dusun Bebak Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah.	1. Jaringan Pipa PVC 1,5"	:	1.150	m'	187,000,000	186,080,000	BEBAK	KOPANG REMBIGA	KOPANG	LOMBOK TENGAH	100 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 3/4"	:	675	m'							
2	Pembangunan SPAM Dusun Bisok Bokah Desa Bebuak Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah.	1. Jaringan Pipa PVC 2"	:	530	m'	187,000,000	186,012,000	BISOK BOKAH	BEBUAK	KOPANG	LOMBOK TENGAH	160 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 3/4"	:	497	m'							
3	Pembangunan SPAM Dusun Kali Bening. Desa Mamben Daya. Kec. Wanasaba. Kab. Lombok Timur.	1. Jaringan Pipa PVC 4"	:	49	m'	191,000,000	189,999,000	KALI BENING	MAMBEN DAYA	WANASABA	LOMBOK TIMUR	300 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 3"	:	1.272	m'							
4	Pembangunan SPAM Dusun Kr. Anyar Timur. Desa Mamben Lauk. Kec. Wanasaba. Kab. Lotim.	1. Jaringan Pipa PVC 4"	:	484	m'	191,000,000	190,045,000	KARANG ANYAR TIMUK	MAMBEN LAUK	WANASABA	LOMBOK TIMUR	350 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 3"	:	441	m'							

5	Pembangunan SPAM Dusun Lingkok Marang Desa Kotaraja Kec. Sikur Kab. Lombok Timur.	1. Jaringan Pipa PVC 4"	:	132	m'	25,000,000	24,775,000	LINGKOK MARANG	KOTARAJA	SIKUR	LOMBOK TIMUR	50 KK
6	Pembangunan SPAM Dusun Pemotoh Tengah Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah.	1. Jaringan Pipa PVC 4"	:	300	m'	191,000,000	189,987,000	PEMOTONG TENGAH	AIK BERIK	BATU KELIANG UTARA	LOMBOK TENGAH	250 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 3"	:	902	m'							
7	Pembangunan SPAM Lingkungan Karang Baru Barat Desa Sasake Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah.	1. Jaringan Pipa PVC 2"	:	497	m'	187,000,000	186,066,000	KARANG BARU BARAT	SASAKE	PRAYA TENGAH	LOMBOK TENGAH	200 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 3/4"	:	500	m'							
8	Pembangunan SPAM Masjid NURUL IMAN Dusun Loang Sawak Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur.	1. Jaringan Pipa PVC 4"	:	400	m'	95,000,000	94,525,000	LOANG SAWAK	LENDANG NANGKA UTARA	MASBAGIK	LOMBOK TIMUR	180 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 2"	:	209	m'							
9	Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih Rumah Sakit Abdul Kadir Manambai, Kabupaten Sumbawa.	1. Jaringan Pipa PVC 1,5"	:	700	m'	150,000,000	149,009,000	-	RS. MANAMBAI	MOYO HILIR	SUMBAWA	200 KK
10	Pembangunan SPAM Air Bersih Pondok Pesantren Al-Majidiah Kab. Sumbawa.	1. Jaringan Pipa PVC 1,5"	:	700	m'	100,000,000	99,010,000	-	PONPES AL-MAJIDIAH	MOYO HILIR	SUMBAWA	50 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 1/2"	:	20	m'							
11	Pembangunan SPAM Desa Klungkung Kec. Batu Lanteh Kab. Sumbawa.	1. Jaringan Pipa HDPE 3"	:	1.250	m'	195,000,000	194,222,000	-	KLUNGKUNG	BATU LANTEH	SUMBAWA	500 KK

12	Pembangunan SPAM Desa Mumbul Sari Kec. Bayan KLU.	1. Jaringan Pipa PVC 4"	:	1.000	m'	195,000,000	193,910,000	-	MUMBULSARI	BAYAN	LOMBOK UTARA	350 KK
13	Pembangunan SPAM Desa Tete Batu Kec. Sikur Kab. Lombok Timur.	1. Jaringan Pipa PVC 16"	:	6	m'	195,000,000	194,244,000	-	TETE BATU	SIKUR	LOMBOK TIMUR	380 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 4"	:	581	m'							
		3. Jaringan Pipa PVC 2"	:	500	m'							
		4. Jaringan Pipa PVC 1/2"	:	80	m'							
14	Pembangunan SPAM Dusun Sangiang Desa Selengen Kec. Kayangan KLU.	1. Jaringan Pipa PVC 4"	:	1.000	m'	195,000,000	193,986,000	SANGIANG	SELENGEN	KAYANGAN	LOMBOK TIMUR	150 KK
15	Pembangunan SPAM Dusun Sukarara Utara Desa Sukarara Kel. Sukarara Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur.	1. Jaringan Pipa PVC 2"	:	382	m'	30,000,000	29,580,000	SUKARARA UTARA	SUKARARA	SAKRA BARAT	LOMBOK TIMUR	40 KK
16	Pembangunan SPAM Ulem-Ulem Berseri Dusun Orong Gerisak Desa Tetebatu Kec. Sikur Kab. Lombok Timur.	1. Jaringan Pipa PVC 1,5"	:	1.087	m'	200,000,000	198,880,000	ORONG GRISAK	TETE BATU	SIKUR	LOMBOK TIMUR	450 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 3/4"	:	1.087	m'							
17	Pembangunan SPAM SMK IT Pancor Dao Batukliang Kab. Lombok Tengah	1. Jaringan Pipa PVC 1,5"	:	1.050	m'	200,000,000	198,870,000	-	PANCOR DAO	BATUKLIANG	LOMBOK TENGAH	100 KK
TOTAL				17.481		2,714,000,000	2,699,200,000					3.810 KK

B	APBD PERUBAHAN											
1	Air Bersih Jaran Pusang Desa Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa.	1. Jaringan Pipa PVC 4"	:	1.000	m'	195,000,000	193,900,000	JARAN PUSAR	MUER	PLAMPANG	SUMBAWA	400 KK
2	Pembangunan perpipaan air minum pipa 2 inci Kel. UPT Perode SP III Kec. Plampang Kab. Sumbawa DESA PRODE SP 3, Kab. Sumbawa.	1. Jaringan Pipa PVC 2"	:	1.508	m'	150,000,000	148,925,000	PERODE	SP III	PLAMPANG	SUMBAWA	350 KK
3	Pembangunan SPAM Desa Gontoran Kec. Narmada Kab. Lombok Barat	1. Jaringan Pipa HDPE 4"	:	800	m'	200,000,000	198,885,000	-	GONTORAN	NARMADA	LOMBOK BARAT	450 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 1.5"	:	1783.66	m'							
4	Pembangunan SPAM Desa Gumantar Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara.	1. Jaringan Pipa PVC 3"	:	589	m'	200,000,000	198,950,000	-	GUMANTAR	KAYANGAN	LOMBOK UTARA	300 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 2"	:	1274	m'							
		3. Jaringan Pipa PVC 1,5"	:	350	m'							
5	Pembangunan SPAM Desa Kekait Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat.	1. Jaringan Pipa PVC 3"	:	150	m'	200,000,000	198,875,000	-	KEKAIT	GUNUNG SARI	LOMBOK BARAT	250 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 2"	:	507	m'							
		3. Jaringan Pipa PVC 1,5"	:	2.642	m'							

6	Pembangunan SPAM Desa Menggala Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara.	1. Jaringan Pipa PVC 3"	:	150	m'	200,000,000	198,875,000	-	MENGGALA	PEMENANG	LOMBOK UTARA	150 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 2"	:	507	m'							
		3. Jaringan Pipa PVC 1,5"	:	2.642	m'							
7	Pembangunan SPAM Desa Pakuan Kec. Narmada Kab. Lombok Barat.	1. Jaringan Pipa PVC 3"	:	1.472	m'	200,000,000	198,875,000	-	PAKUAN	NARMADA	LOMBOK BARAT	300 KK
8	Pembangunan SPAM Desa Pemenang Timur Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara.	1. Jaringan Pipa PVC 3"	:	180	m'	200,000,000	198,830,000	-	PEMENANG TIMUR	PEMENANG	LOMBOK UTARA	450 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 2"	:	1.140	m'							
		3. Jaringan Pipa PVC 1,5"	:	1.140	m'							
9	Pembangunan SPAM Desa Pengadangan Kec. Pringgasele Kab. Lombok Timur.	1. Jaringan Pipa PVC 3"	:	300	m'	200,000,000	198,885,000	-	PENGADANGAN	PERINGGASELA	LOMBOK TIMUR	450 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 2"	:	310	m'							
		3. Jaringan Pipa PVC 1,5"	:	1.520	m'							
10	Pembangunan SPAM Dusun Barung Birak Desa Sambielen Kec. Bayan Kab. Lombok Utara.	1. Jaringan Pipa PVC 2"	:	630	m'	200,000,000	198,885,000	BARUNG BIRAK	SAMBIELEN	BAYAN	LOMBOK UTARA	300 KK
11	Pembangunan SPAM Dusun Lenggorong Desa Sambielen Kec. Bayan Kab. Lombok Utara.	1. Jaringan Pipa HDPE 2"	:	1.370	m'	200,000,000	198,925,000	LENGGORONG	SAMBIELEN	BAYAN	LOMBOK UTARA	250 KK

12	Pembangunan Saluran Air Bersih Kel. Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur Desa Wanasaba. Kec.Wanasaba. Kab. Lombok Timur.	1. Jaringan Pipa HDPE 4"	:	800	m'	200,000,000	198,880,000	-	WANASABA	WANASABA	LOMBOK TIMUR	500 KK
13	Pembangunan SPAM Dusun Batulayar utara Desa Batu Layar Kecamatan Batulayar Kab Lombok Barat.	1. Jaringan Pipa PVC 1,5"	:	300	m'	30,000,000	29,250,000	BATULAYAR UTARA	BATULAYAR	BATULAYAR	LOMBOK BARAT	50 KK
		2. Jaringan Pipa PVC 1"	:	500	m'							
TOTAL				21.781		2,375,000,000	2,360,915,000					4.200 KK
GRAND TOTAL				39.262		5,089,000,000	5,060,115,000					8.010 KK

BAB VII

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN YANG DIARAHKAN

Dana Perimbangan merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dari dana APBN ke APBD untuk menunjang program Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Bagi Hasil Pajak, 2) Bagi Hasil Bukan Pajak, 3) Dana Alokasi Umum (DAU) dan 4) Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Dana Alokasi Khusus pada Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp. 12.558.556.000,- untuk DAK Reguler – Jalan dimana terdiri dari Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Provinsi) 2 Paket dan 2 Paket Kegiatan Penunjang yaitu Pengawasan Teknis. Sedangkan Untuk DAK Penugasan – Jalan terdiri sebesar Rp. 53.082.251.000,- yang terdiri dari 1 Paket Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan (Khusus Provinsi) dan 4 item Kegiatan Penunjang yaitu Survey, Pengawasan, Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi (Data Terlampir).

Untuk Bidang SDA Sub Bidang Pendukung Kedaulatan Pangan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 35.011.210.000,- yang terdiri dari 6 Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan 6 Paket Kegiatan Konsultan Pengawasan, 1 Kegiatan Epaksi dan Perjalanan Dinas. (Data Terlampir).

**TABEL 7.1.1 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022**

JENIS : REGULER - JALAN

NAMA OPD PELAKSANA DAK : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (BIDANG BINA MARGA)

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN					MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI S/D TRIWULAN IV				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGA N/ PERMASALA HAN	
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU			SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		METODE PEMBAYAR AN	KEUANGAN		FISIK			
					DAK Rp. (dalam ribuan)	APBD Rp. (dalam ribuan)	Jumlah Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	TOTAL DAK REGULER				12,558,556	351,011	12,909,567	-	-	12,727,090		12,726,591.95	98.58	-	100.00			
	BIDANG JALAN				12,558,556	351,011	12,909,567	-	-	12,727,090		12,726,591.95	98.58	-	100.00			
	SUB BIDANG JALAN				12,558,556	351,011	12,909,567	-	-	12,727,090		12,726,591.95	98.58	-	100.00			
	DINAS PUPR PROV. NTB				12,558,556	351,011	12,909,567	-	-	12,727,090		12,726,591.95	98.58	-	100.00			
	01 - PENANGANAN JALAN																	
	1. Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Provinsi) Piong - Sp.	1.65	Km	13.940 jiwa (Kec. Sanggar)	6,187,500		6,187,500	-	-	1,65 Km	6,187,500	Bertahap	6,187,500.00	100.00	1,65 Km	100.00	Kabupaten Bima	
	02 - PENANGANAN JEMBATAN																	
	2. Penggantian Jembatan (Khusus Provinsi) Pelangan - Sp. Pengantap	15.00	m	66.170 jiwa (Kec. Sekotong)	5,762,067		5,762,067	-	-	15,00 m	5,603,973	Bartahap	5,603,973.00	97.26	15,00 m	100.00	Kabupaten Lombok Barat	
	99 - PENUNJANG																	
	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Reguler) - Tematik 00																	
	3. Pengawasan Teknis Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Piong-	6.00	Orang Bulan		380,000		380,000			6,00 Orang Bulan	378,762	Bertahap	378,596.03	99.63		100.00	Kabupaten Bima	
	4. Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan Bengkang (DAK)	6.00	Orang Bulan		228,989	351,011	580,000			6,00 Orang Bulan	556,855	Bertahap	556,522.92	95.95		100.00	Kabupaten Lombok Barat	

**TABEL 7.1.2 LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022**

JENIS : PENUGASAN - JALAN

NAMA OPD PELAKSANA DAK : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (BIDANG BINA MARGA)

BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN						MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI S/D TRIWULAN IV				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN
	VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU			SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		METODE PEMB.	KEUANGAN		FISIK			
				DAK Rp. (dalam ribuan)	APBD Rp. (dalam ribuan)	Jumlah Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
TOTAL DAK PENUGASAN				53,082,251	442,021	53,524,272		138,522		48,342,520		36,929,646	90.51	#REF!			
BIDANG BINA MARGA				53,082,251	442,021	53,524,272		138,522		48,342,520		36,929,646	90.51	#REF!			
SUB BIDANG BINA MARGA				53,082,251	442,021	53,524,272		138,522		48,342,520		36,929,646	90.51	#REF!			
DINAS PUPR PROV. NTB				53,082,251	442,021	53,524,272		138,522		48,342,520		36,929,646	90.51	#REF!			
PENANGANAN JALAN				38,275,750		38,275,750	-	-		34,916,634		34,916,634		-			
1. Pelebaran Jalan (Khusus Provinsi) Kuta - Keruak	0.70	Km	174.535 jiwa (Kec. Pujut dan Sakra)	16,325,750		16,325,750			0,70 Km	16,324,984	Bertahap	16,324,984	100.00	0,70 Km	100.00	Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur	
2. Pembangunan Jalan (Khusus Provinsi) Sekokat - Bawi	5.00	Km	68.270 jiwa (Kec. Labangka dan Dompnu)	21,950,000		21,950,000			5,00 Km	18,591,650	Bertahap	18,591,650	84.70	5,00 Km	100.00	Kabupaten Sumbawa dan Dompnu	
PENANGANAN JEMBATAN				13,075,000		13,075,000				11,513,576		11,513,576					
1. Penggantian Jembatan (Khusus Provinsi) Penujak - Mt. Ajan	25.00	m	140.550 jiwa (Kec. Praya Barat dan 93490 jiwa)	8,125,000		8,125,000			25,00 m	7,153,794	Bertahap	7,153,794	88.05	25,00 m	100.00	Kabupaten Lombok Tengah	
2. Penggantian Jembatan (Khusus Provinsi) Tawali - Sape	15.00	m	(Kec. Wera dan Sape)	4,950,000		4,950,000			15,00 m	4,359,782	Bertahap	4,359,782	88.08	15,00 m	100.00	Kabupaten Bima	
PENUNJANG				1,731,501	442,021	2,173,522	-	138,522		1,912,310		2,013,012		-			
1. Pengawasan Teknis Pelebaran Jalan Kuta - Kruak (DAK)	6.00	Orang Bulan		380,000	95,000	475,000	-	-	6,00 Orang Bulan	379,858	Bertahap	379,858	79.97		100.00	Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur	
2. Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan Sori Molu (DAK)	6.00	Orang Bulan		232,979	347,021	580,000	-	-	6,00 Orang Bulan	553,070	Bertahap	552,738	95.30		100.00	Kabupaten Sumbawa dan Dompnu	
3. Pengawasan Teknis Jalan Sekokat - Mbawi	6.00	Orang Bulan		400,000		400,000	-	-	6,00 Orang	399,994	Bertahap	399,994	100.00		100.00	Kabupaten Lombok Tengah	
4. Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan Tebek	6.00	Orang Bulan		580,000		580,000	-	-	6,00 Orang	579,388	Bertahap	579,056	99.84		100.00	Kabupaten Bima	
5. Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan (Penugasan) - Tematik 01	12.00	Frekuensi		50,003		50,003	12,00 Frekuensi	50,003			Bertahap	36,112	72.22		#REF!	Provinsi NTB	
6. Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan (Penugasan) - Tematik 03	12.00	Frekuensi		88,519		88,519	12,00 Frekuensi	88,519			Bertahap	65,254	73.72		#REF!	Provinsi NTB	

BAB VIII
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN

8.1. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN

Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi. Adapun Pelaksanaan Program, Kegiatan, Subkegiatan pada Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTB bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tahun 2022 Dinas PUPR Anggaran Dekon-TP untuk Bidang Sumber Daya Air Sebesar Rp. 24.137.181.614,00,- yang terdiri Operasi Rutin 16 Paket, Pemeliharaan Berkala 9 Paket, Pemeliharaan Rutin 16 Paket dan Paket Penyusunan Pelaporan 16 Paket. Tambahan Dukungan Manajemen sebesar Rp. 787.300.300,00,- (Tabel Terlampir)

Pada Bidang Bina Marga – Jalan, Dana Dekon-TP sebesar Rp. 2.770.212.000,- yang terdiri dari 7 Paket Kontrak dan Paket 10 Paket Swakelola. (Tabel Terlampir)

**TABEL 8.1.1 FORM CAPAIAN KINERJA LPPD PROVINSI NTB TAHUN 2022
TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI.
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi.
(Bidang SDA – Irigasi)**

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI KEGIATAN	(%)	
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peraturan Menteri PUPR No : 33/PRT/M/2015 Tahun : 2015 Tentang : Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Program : Ketahanan Sumber Daya Air		SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat	24.139.983.000,00	24.137.181.614,00	99,99	Terealisasinya Kegiatan Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara pada 16 (enam belas) daerah irigasi	100%
			Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana							
			Keluaran : Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara							
			Operasi rutin							
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Remening Kompleks, Kab. Lobar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;22.26 km;3293 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Barat						
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Pengga, Kab. Lobar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;60.38 km;3589 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Barat						
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Mujur II, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;31.72 km;3506 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah						
Operasi Rutin Daerah Irigasi Batu Jai, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;37.72 km;3580 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah									
Operasi Rutin Daerah Irigasi Surabaya, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;22.34 km;3258 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah									

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (%)	REALISASI KEGIATAN (%)
		Operasi Rutin Daerah Irigasi Jurang Sate Hulu, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;70.21 km;4229 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah				
		Operasi Rutin Daerah Irigasi Jurang Sate Hilir, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;96.13 km;6439 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah				
		Operasi Rutin Daerah Irigasi Jurang Batu, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;43.91 km;3500 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah				
		Operasi Rutin Daerah Irigasi Katon Kompleks, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;82.00 km;7495 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah				
		Operasi Rutin Daerah Irigasi Tanggik Kompleks, Kab. Lotim;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;85.81 km;3424 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Timur				
		Operasi Rutin Daerah Irigasi Pandanduri- Swangi, Kab. Lotim;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;100.10 km;5168 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Timur				
		Operasi Rutin Daerah Irigasi Batu Bulan, Kab. Sumbawa;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;95.73 km;5782 km;F;S;SYC	Kabupaten Sumbawa				
		Operasi Rutin Daerah Irigasi Mamak Kakiang, Kab. Sumbawa;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;93.23 km;5416 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Sumbawa				
		Operasi Rutin Daerah Irigasi Rababaka Kompleks, Kab. Dompu;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;23.69 km;4050 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Dompu				

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI KEGIATAN	(%)
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Katua Kompleks, Kab. Dompus;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;17.10 km;3330 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Dompus						
			Operasi Rutin Daerah Irigasi Pelaparado, Kab. Bima;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;66.45 km;4815 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Bima						
			Pemeliharaan berkala							
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Remening Kompleks, Kab. Lobar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;2.33 km;116.48 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Barat						
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Pengga, Kab. Lobar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;2.85 km;142.52 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Barat						
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Mujur II, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;2.62 km;130.75 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah						
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Jurang Sate Hulu, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;3.37 km;168.50 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah						
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Jurang Sate Hilir, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;3.63 km;181.74 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah						
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Katon Kompleks, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;3.13 km;156.57 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah						
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Pandanduri- Swangi, Kab. Lotim;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;2.98 km;148.78 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Timur						

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (%)	REALISASI KEGIATAN (%)
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Batu Bulan, Kab. Sumbawa;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;2.41 km;120.57 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Sumbawa			
			Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Mamak Kakiang, Kab. Sumbawa;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;2.22 km;111.09 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Sumbawa			
			Pemeliharaan Rutin				
			Pemeliharaan Rutin Daerah Remening Kompleks, Kab. Lobar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;22.26 km;3293 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Barat			
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Pengga, Kab. Lobar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;60.38 km;3589 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Barat			
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Mujur II, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;31.72 km;3506 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah			
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Batu Jai, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;37.72 km;3580 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah			
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Surabaya, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;22.34 km;3258 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah			
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Jurang Sate Hulu, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;70.21 km;4229 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah			
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Jurang Sate Hilir, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;96.13 km;6439 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah			

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (%)	REALISASI KEGIATAN (%)
		Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Jurang Batu, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;43.91 km;3500 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah				
		Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Katon Kompleks, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;82.00 km;7495 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Tengah				
		Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Tanggik Kompleks, Kab. Lotim;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;85.81 km;3424 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Timur				
		Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Pandanduri- Swangi, Kab. Lotim;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;100.10 km;5168 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Lombok Timur				
		Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Batu Bulan, Kab. Sumbawa;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;95.73 km;5782 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Sumbawa				
		Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Mamak Kakiang, Kab. Sumbawa;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;93.23 km;5416 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Sumbawa				
		Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Rababaka Kompleks, Kab. Dompus;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;23.69 km;4050 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Dompus				
		Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Katua Kompleks, Kab. Dompus;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;17.10 km;3330 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Dompus				
		Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Pelaparado, Kab. Bima;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;66.45 km;4815 Hektar;F;S;SYC	Kabupaten Bima				
		Penyusunan					

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (%)	REALISASI KEGIATAN (%)
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Remening Kompleks, Kab. Lobar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Barat				
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Pengga, Kab. Lobar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Barat				
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Mujur II, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Tengah				
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Batu Jai, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Tengah				
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Surabaya, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Tengah				
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Jurang Sate Hulu, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Tengah				

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (%)	REALISASI KEGIATAN (%)
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Jurang Sate Hilir, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Tengah				
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Jurang Batu, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Tengah				
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Katon Kompleks, Kab. Loteng;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Tengah				
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Tanggik Kompleks, Kab. Lotim;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Timur				
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Pandanduri- Swangi, Kab. Lotim;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Lombok Timur				
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Batu Bulan, Kab. Sumbawa;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Sumbawa				

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI KEGIATAN	(%)
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Mamak Kakiang, Kab. Sumbawa;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Sumbawa						
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Rababaka Kompleks, Kab. Dompu;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Dompu						
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Katua Kompleks, Kab. Dompu;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Dompu						
		Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Daerah Irigasi Pelaparado, Kab. Bima;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1.00 Dokumen;1.00 Dokumen;NF;AU;SYC	Kabupaten Bima						
		Program : Dukungan Manajemen			787.812.000,00	787.300.300,00	99,94	Terealisasinya Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Satker SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB.	100%
		Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air							
		Keluaran : Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan							
		Layanan Dukungan Manajemen Satker (PPK OP I), Kota Mataram;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1 Layanan;1 Layanan;NF;AU;SYC	Mataram						
		Layanan Dukungan Manajemen Satker (PPK OP II), Kota Mataram;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1 Layanan;1 Layanan;NF;AU;SYC	Mataram						

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI KEGIATAN	(%)
			Layanan Dukungan Manajemen Satker (PPK OP III) Kota Sumbawa Besar;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1 Layanan;1 Layanan;NF;AU;SYC	Sumbawa						
			Layanan Dukungan Manajemen Satker (PPK OP IV), Kota Bima;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;1 Layanan;1 Layanan;NF;AU;SYC	Bima						
			Sistem pelaporan secara elektronik (e-Monitoring), Kota Mataram;Tersebar;Nusa Tenggara Barat;24 Laporan;24 Laporan;NF;AU;SYC	Mataram						

**TABEL 8.1.2 FORM CAPAIAN KINERJA LPPD PROVINSI NTB TAHUN 2022
TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI.
MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI.
(BIDANG BINA MARGA – JALAN)**

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	(%)	REALISASI KEGIATAN	(%)	KET.
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peraturan Menteri PUPR No : 33/PRT/M/2015 Tahun : 2015 Tentang : Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Program : Infrastruktur Konektivitas Kegiatan : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Keluaran : Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas (Duknis) Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan; 10.066 Km Pemeliharaan Rutin Kondisi - Jln. Adi Sucipto / Ampenan - Selaparang; 0.6 Km - Jln. Adi Sucipto / Selaparang - Rembiga (Jln. Sudirman); 0.12 Km - Jln. Jend. A. Yani (Mataram); 1.03 Km - Jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram); 0.18 Km - Jln. Energi (Mataram); 0.3 Km - Jln. Raya Banjar Getas (Mataram); 0.7 Km - Jln. Dr. Sujono (Mataram); 0.36 Km - Jln. TM Rais (Mataram); 0.48 Km - Jln. T. Ali Batu (Mataram); 0.24 Km - Jln. Teguh Faisal (Mataram); 0.42 Km - Jln. TGH. Saleh Hambali (Dasan Cermin - Bengkel); 0.62 Km - Jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram); 0.06 Km Penunjang/Holding - Jln. Jend. A Yani (Mataram); 0.09 Km - Jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram); 0.04 Km - Jln. Energi (Mataram); 0.65 Km - Jln. Raya Banjar Getas (Mataram); 0.43 Km - Jln. Dr. Sujono (Mataram); 1.55 Km - Jln. TM Rais (Mataram); 0.09 Km - Jln. T. Ali Batu (Mataram); 0.17 Km - Jln. Teguh Faisal (Mataram); 1.36 Km - Jln. TGH. Saleh Hambali (Dasan Cermin - Bengkel); 0.17 Km - Jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram); 0.25 Km - Jln. Sudirman (Mataram); 0.17 Km	Kota Mataram	SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat	2,770,212,000.00	2,693,390,000.00	97.23	Terealisasinya Kegiatan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Dalam Kota Mataram	100	

		- Jln. TGH. Saleh Hambali (Dasan Cermin - Bengkel); 0.03 Km	Kota Mataram						
		- Jln. Jend. A. Yani (Mataram); 0.01 Km	Kota Mataram						
		- Jln. Raya Banjar Getas (Mataram); 0.07 Km	Kota Mataram						
		- Jln. Dr. Sujono (Mataram); 0.35 Km	Kota Mataram						
		- Jln. T. Ali Batu (Mataram); 0.03 Km	Kota Mataram						
		- Jln. Teguh Faisal (Mataram); 0.24 Km	Kota Mataram						
		- Jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram); 0.04 Km	Kota Mataram						
		Jalan Strategis (ProPN) (PEN); 76.84 m							
		Pemeliharaan Berkala Jembatan							
		- Sweta; 8.0 m	Kota Mataram						
		- Selagelas I; 4.8 m	Kota Mataram						
		- KP. Banjar; 18.0 m	Kota Mataram						
		- Tj. Karang II; 14.6 m	Kota Mataram						
		- Bengkel I; 4.4 m	Kota Mataram						
		- Rejasi; 2.4 m	Kota Mataram						
		- Meninting A; 24.64 m	Kota Mataram						
		Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN); 213.2 m							
		Pemeliharaan Rutin Jembatan							
		- Selagelas II A; 46.0 m	Kota Mataram						
		- Selagelas II b; 46.0 m	Kota Mataram						
		- Batu Dawe; 15.0 m	Kota Mataram						
		- Tj. Karang I; 7.5 m	Kota Mataram						
		- Loang Balok A; 21.0 m	Kota Mataram						
		- Loang Balok B; 7.0 m	Kota Mataram						
		- Meninting B; 50.0 m	Kota Mataram						
		Jalan Strategis (ProPN) (Padat Karya) (PEN); 115.26 m							
		Pemeliharaan Berkala Jembatan							
		- Sweta; 12.0 m	Kota Mataram						
		- Selagelas I; 7.0 m	Kota Mataram						
		- KP. Banjar; 27.0 m	Kota Mataram						
		- Tj. Karang II; 21.9 m	Kota Mataram						
		- Bengkel I; 6.4 m	Kota Mataram						
		- Rejasi; 3.6 m	Kota Mataram						
		- Meninting A; 37.36 m	Kota Mataram						

		Keluaran : Pelayanan Umum dan Perlengkapan Administrasi Kegiatan Satker Rapat Rutin Satker Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Covid-19 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Keluaran : Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Monitoring) Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN		699,682,000.00	669,801,000.00	95.73	Terealisasinya Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi serta Penyusunan Laporan Keuangan BMN pada Satker Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB	100	
		Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Kegiatan: Program Infrastruktur Konektivitas Keluaran (Output): Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Rincian Kegiatan: 1. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 2. Jalan Strategis (ProPN) (PEN) 3. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN) 4. Jalan Strategis (ProPN) (PEN) 5. Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN) 6. Jalan Strategis (ProPN) (Padat Karya) (PEN)	NUSA TENGGARA BARAT	3,469,894,000.00	3,363,190,000.00	96.92	Kegiatan pemeliharaan rutin jalan (PEN) dilakukan untuk mempertahankan kondisi mantap jalan agar tetap mampu melayani pengguna jalan dengan aman dan nyaman sesuai dengan umur rencana (design life). Pada output pemeliharaan rutin jalan yang dilakukan di lingkungan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Barat terdiri dari 3 komponen yaitu, Pemeliharaan Rutin Jalan, Pemeliharaan Rutin Kondisi serta Penunjang/Holding. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jalan Strategis (ProPN)	100	

BAB IX

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 merupakan laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dalam mempertanggung jawabkan kinerja suatu pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Pekerjaan Umum, dan Bidang Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022.

Evaluasi indikator kinerja program unggulan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Jalan Provinsi;

Pada tahun 2022, kinerja jalan mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 84,52 %, hal ini terjadi karena adanya dukungan penanganan jalan melalui program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dengan sumber dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 – 2022 serta program penanganan jalan dan jembatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar 84,52 %, naik sebesar 0,51 % dari tingkat kemantapan jalan tahun 2021 yang tercatat sebesar 84,01 %, namun capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 85,36 %. Pencapaian tingkat kemantapan jalan dibawah nilai target yang ditetapkan ini diantaranya disebabkan belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan akibat keterbatasan anggaran di masa pandemi Covid-19, masih tingginya pelanggaran terhadap pembatasan dimensi dan muatan kendaraan (*over-dimension over-loading/ODOL*) serta kerusakan dini akibat bencana alam (*curah hujan tinggi dan perubahan tata guna lahan*). Jenis pekerjaan penanganan jalan yang dilakukan meliputi kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Bidang Binamarga maupun Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Lombok dan Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Sumbawa.

- Pengelolaan Sumber Daya Air;

Indikator kinerja Cakupan Areal layanan Jaringan Irigasi pada tahun 2022 telah melampaui target yaitu sebesar 77,60% dari target tahun 2022 sebesar 77,00%. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 untuk mengelola 35 Daerah Irigasi dengan luasan 1.000 Ha – 3.000 Ha. Secara keseluruhan terdapat 58.105 Ha luasan kewenangan daerah irigasi yang dikelola. Adapun Panjang saluran dari 35 Daerah Irigasi tersebut adalah 721,95 kilometer dengan saluran dalam kondisi baik sepanjang 413,05 Km (57 %), rusak ringan 61,78 km (9 %) , rusak sedang 86,05 km (12 %) dan rusak berat 161,03 km (22 %).

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Indikator kinerja dalam sasaran strategis ini adalah Cakupan Air Minum. Pada tahun 2022 realisasi kinerja Cakupan Air Minum mencapai 79,11 % melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra sebesar 78,45 %, dengan tingkat capaian 100.84 %.

Langkah-langkah dimasa datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja antara lain:

1. Meningkatkan dan mempertahankan kemantapan jalan dan jembatan;
2. Membangun jalan provinsi yang masih berupa lapisan tanah dan belum tembus sekitar 182,61 Km;
3. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan irigasi (pengairan) terutama untuk jaringan irigasi lahan kering;
4. Meningkatkan pengendalian banjir untuk menurunkan daya rusak air;
5. Pengembangan embung-embung kecil/ rakyat untuk mempertahankan dan menampung air hujan pada daerah - daerah kritis air;
6. Percepatan pembangunan SPAM Regional untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air minum lintas kabupaten/ kota;

Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah sehingga tidak hanya wacana semata untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat, namun benar – benar dapat diaplikasikan dalam pembangunan yang berorientasi pada hasil berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan pihak – pihak terkait harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap perangkat daerah terkait, masyarakat dunia usaha dan civil society.